

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Bantul

1. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu : **"BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS"**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi³⁷.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

³⁷www.bantul.go.id diakses pada tanggal 17 desember 2012 pukul 10.00 WIB

Ijo Royo-Royo dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan baik di musim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.³⁸

³⁸www.bantulkab.go.id, di akses pada tanggal 17 desember 2012, pukul 10.00 WIB

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari Visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dengan adanya pernyataan Misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang.

Adapun MISI Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kesejahteraan dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang didasarkan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.
- 3) Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum.
- 4) Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Kondisi Geografis dan iklim

a. Kondisi geografis

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai lima Kabupaten dan satu Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Kabupaten Bantul mempunyai Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km² (41,62 %).

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.³⁹

b. Iklim

Menurut data dari Dinas pengairan di Kabupaten Bantul terdapat 12 titik Stasiun pemantau curah hujan yaitu Stasiun pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngetal, Gedongan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo dan Dligo. Sepanjang Tahun 2010 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yang tercatat di Stasiun Pemantau Gandok , yaitu sebanyak 728 mm dengan jumlah hujan 13 hari.

3. Kondisi Demografi

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk disuatu daerah. Hasil registrasi penduduk awal tahun 206. Jumlah total penduduk Bantul adalah 809.971 jiwa, yang terbagi

³⁹ibid

menjadi : laki -laki = 397.261 jiwa (49,04%); Perempuan = 412.710 jiwa(50.95%); Penduduk dewasa = 607.380 jiwa(74,99%) dan penduduk anak-anak 185.906 jiwa (205.01%). Berikut data Penduduk Kabupaten Bantul dari tahun 2006-2010.⁴⁰

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk dan KK Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010

Kecamatan	2006		2008		2010	
	Penduduk	KK	Penduduk	KK	Penduduk	KK
Srandakan	31.012	8.610	31.102	8.943	28.582	8.028
Sanden	34.255	10.303	34.433	10.331	29.636	8.919
Kretek	31.479	7.945	31.809	8.173	29.135	7.410
Pundong	32.567	7.236	32.618	7.413	31.603	7.095
Bambanglipuro	43.387	10.632	44.174	11.484	37.311	9.363
Pandak	49.220	12.382	50.545	12.823	47.674	12.046
Bantul	60.023	15.038	61.277	15.866	59.234	15.030
Jetis	50.359	14.904	51.398	16.272	51.927	15.787
Imogiri	57.500	14.496	58.744	16.528	56.151	14.902
Dlingo	37.814	9.560	38.209	9.962	35.542	9.126
Pleret	34.112	12.437	36.191	13.183	43.185	16.000
Piyungan	38.481	11.313	39.206	12.301	48.646	14.655
Banguntapan	86.053	21.505	88.979	23.187	120.123	30.520
Sewon	78.090	25.503	79.948	27.795	104.168	34.486
Kasihan	80.159	16.534	85.434	24.782	110.427	27.013
Pajangan	30.826	7.445	31.826	7.879	32.810	8.024
Sedayu	45.204	9.835	46.163	10.142	44.418	9.706

b. Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin tahun 2011

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan golongan umur tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur dan jenis kelamin Tahun 2011

No	Kelompok Umur	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	38.230	36.045	74.275
2	5-9	35.280	33.105	68.385
3	10-14	35.029	33.720	68.749
4	15-19	36.477	35.251	71.728
5	20-24	37.336	36.026	73.362
6	25-29	38.501	37.433	75.934
7	30-34	37.989	37.319	75.308
8	35-39	35.447	35.676	71.123
9	40-44	34.896	35.895	70.791
10	45-49	31.621	32.634	64.255
11	50-54	28.268	27.903	56.171
12	55-59	20.493	18.939	39.432
13	60-64	12.765	15.043	27.808
14	65-69	11.855	13.779	25.634
15	70-74	10.493	13.233	23.626
16	75+	14.779	19.803	34.582
Jumlah		459.459	461.804	921.263

c. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data perkembangan PDRB dapat disimpulkan bahwa kondisi makro ekonomi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- 1) Atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% dan pada tahun 2011 naik menjadi 5,27%;
- 2) PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp9.957.620,- menjadi Rp10.882.642,- pada tahun 2011. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB per kapita mengalami peningkatan dari Rp4.353.170,- pada tahun 2010 menjadi Rp4.533.848,- pada tahun 2011.

Nomor	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan tahun 2000	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai(juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2010	9.076.401	10,95	3.967.948	4,97
2	2011	10.025.776	10,46	4.176.867	5,27

Sumber : Bps, 2012

Apabila dilihat dari pergeseran sektoral, empat sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan PDRB berturut-turut adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan dari 23,87% pada tahun 2010 menjadi 22,76% pada tahun 2011:

sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik dari 19,90% pada tahun 2010 menjadi 20,22% pada tahun 2011; sektor industri pengolahan sebesar 16,33% pada tahun 2010 menjadi 16,29% pada tahun 2011; dan sektor jasa-jasa mengalami kenaikan dari 13,37% pada tahun 2010 menjadi 13,51% pada tahun 2011. Koefisien *Gini Ratio* merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai koefisien Gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil.

Koefisien Gini tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada tahun 2011 diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS Pusat pada tahun 2011. Koefisien Gini tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan PDRB, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil.⁴¹

d. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non menengah formal, jumlah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bantul pada Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 520 buah. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 252 buah. Sekolah

Menengah Pertama (SMP) sebanyak 87 buah, Sekolah Menengah Umum (SMU)Negeri 19 buah, SMU Swasta 15 buah, Sekolah Mngah Kejuruan Negeri 13 buah dan SMK Swasta 28 buah.⁴²

e. Pemerintah Daerah

Tabel 2.3

Jumlah Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	506,85

Sumber: Bagian Tata Pemetintah Setda Kabupaten Bantul

Secara administratis Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan yang dibagi mejadi 75 desa dan 933 pedukuhan . Berdasarkan tabel diatas

dan dapat dilihat bahwa Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas

yaitu 55,87 Km². Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan. Struktur organisasi Kabupaten Bantul terdiri dari 13 Sekretariat Daerah, 3 BUMD, 6 bank, 5 BMN, 7 Kantor, 3 Badan, 14 Dinas, dan 17 Kantor Kecamatan.⁴³

B. Profil Kondisi Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 yang terdiri dari sekretaris dan empat bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bidang Data dan Pengkajian, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan Bidang Pemberdayaan Perempuan. Kemudian sebagai tindak lanjut pasal 32 peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2007 tentang Kabupaten Bantul, maka ditetapkan peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja BKKPPKB.

1. Visi dan Misi⁴⁴

Visi

BANTUL SEJAHTERA 2015

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul yang ingin

⁴³Bagian Tata Pemetintah Setda Kabupaten Bantul

⁴⁴www.bantulkab.go.id, diakses pada tanggal 17 desember 2012, pukul 10.00 WIB

mewujudkan kondisi Kabupaten Bantul pada tahun 2015 yaitu kebutuhan dasar keluarga telah terpenuhi secara lahir dan batin yang diwujudkan melalui misi.

Misi

Misi I :Memberdayakan Keluarga dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga

a. Pemberdayaan Keluarga Miskin

1. Menurunnya Proporsi Keluarga Miskin.
2. Peningkatan Kualitas SDM Keluarga Miskin dan terbukanya akses kesempatan kerja serta modal kerja.
3. Meningkatkan produktifitas keluarga miskin.
4. Tersedianya system informasi program (SIP) pengentasan kemiskinan.
5. Terjadinya sinergi antar program dan kemitraan dalam usaha menanggulangi kemiskinan secara terpadu.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Meningkatkan kelembagaan Ekonomi Desa.

b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1. Meningkatnya jumlah keluarga yang mempunyai kegiatan Ekonomi Produktif.

2. Meningkatnya partisipasi mitra usaha dalam kegiatan kelompok UPPKS.
3. Berkembangnya program penguatan modal usaha.
4. Meningkatnya penyerapan modal usaha oleh kelompok UPPKS

c. Ketahanan Keluarga

1. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
2. Berkembangnya Kuantitas dan Kualitas Kelompok BKB, Kelompok BKR dan Kelompok BKL.

Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk mendukung kebijakan kependudukan.

a. Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana

1. Menurunnya proporsi Unmeet need
2. Meningkatnya kelestarian kesertaan KB
3. Menurunnya TFR
4. Meningkatnya Proporsi Keluarga Sejahtera yang menggunakan pelayanan mandiri.
5. Meningkatnya usia kawin pertama wanita 21 tahun.

6. Meningkatnya proporsi keluarga yang memahami tentang Kesehatan Reproduksi.
7. Menurunnya tingkat kegagalan penggunaan alat kontrasepsi.

b. Operasional Kependudukan

1. Komitmen politis untuk melindungi Meningkatnya derajat kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana pelayanan Konseling Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Meningkatnya partisipasi pria dalam program Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana.
4. Meningkatnya komitmen politis untuk perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Misi III : Memperkuat Jaringan Kelembagaan untuk mendukung kelancaran Program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana

a. Penguatan dan Pemantapan Jaringan Kelembagaan

1. Penguatan Kelembagaan Desa dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan LSM dalam Program Kesejahteraan Keluarga Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
3. Tersedianya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, pedoman operasional tentang Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
4. Tersedianya sarana pencatatan dan pelaporan.
5. Meningkatnya kualitas SDM keluarga
6. Meningkatnya partisipasi tenaga program dalam program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
7. Mantapnya mekanisme operasional Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Misi IV : Mendukung Kemitraan dalam rangka Pengembangan Jaringan Informasi Program Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana

a. Penguatan dan Pengembangan Jaringan Informasi

1. Tersedianya data Keluarga Miskin, Keluarga Sejahtera, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
2. Mantapnya pengelolaan pelayanan informasi dan Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

3. Adanya hasil kajian periodic hasil program.
 4. Adanya inovasi program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
- b. Advokasi KIE Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana
1. Meningkatnya komitmen politis terhadap program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
 2. Tersedianya sarana KIE Program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
 3. Meningkatnya Jangkauan Pelayanan KIE Program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
 4. Meningkatnya kepedulian Keluarga terhadap program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
 5. Berkembangnya pusat konseling Program Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

6. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

2. Kedudukan

Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2007 menjelaskan kedudukan , tugas pokok, dan fungsi Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Kedudukan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Badan Kesejahteraan Keluarga , Pemberdayaan perempuan dan Kelurga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Kesejahteraan Keluarga ,Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4. Fungsi

Badan kesejahteraan Keluarga , Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga berencana, keluarga sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah bidang Keluarga berencana, keluarga sejahtera ; Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana Bimbingan teknis dibidang Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelasanaan kesekretariatan badan.
- e. Pelaksanaan program kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Rincian Tugas BKK PP dan KB

Adapun rincian tugas kerja di BKKPPKB Kabupaten Bantul sebagai berikut :

A. Kepala Badan mempunyai tugas :

1. Memimpin penyelenggara, tugas dan fungsi Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretariat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Badan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;
2. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Badan;
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan ;
4. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
5. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan

C. Sub Bidang Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja SuB Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
2. Menyiapkan bahan kerja Sub Bidang Umum;

3. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Badan;
4. Melayani tata naskah dinas, humas, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, dan alat tulis unit kerja;
5. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan sesuai bidang tugasnya; dan
6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

D. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
2. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset

E. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian program untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
2. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian program;
3. Menyusun dan mengelola data base

4. Mengkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Badan;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian program

F. Bidang Data dan Pengkajian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
2. Menyiapkan bahan kerja Bidang; Melaksanakan pengkajian, analisis, penelitian dan pengembangan program Badan;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan terkait kebijakan teknis pengolahan, pengelolaan, pengkajian, dan penhembangan data serta penyebarluasan informasi di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang;
2. Merumuskan kebijakan teknis dalam pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi dan anak;

4. Menyiapkan bahan untuk penyajian data statistik;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

H. Sub Bidang Pengkajian Pengembangan dan Penyebarluasan informasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang;
2. Melaksanakan monitoring evaluasi dan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang Tugasnya.

I. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
2. Menyiapkan bahan kerja Bidang;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis dengan instansi terkait;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Sesuai dengan bidang tugasnya.

J. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang;
2. Merumuskan kebijakan teknis advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi kinerja institusi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

K. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

L. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
2. Menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

3. Memfasilitasi penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

M. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang;
2. Merumuskan kebijakan teknis dalam pembinaan ketahanan keluarga;
3. Melaksanakan pengembangan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

N. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang;
2. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemberdayaan ekonomi keluarga
3. Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan konseling peningkatan ekonomi keluarga;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

O. Bidang Pemberdayaan perempuan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
2. Menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Menyusun kebijakan pelaksanaan PUG serta melakukan koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan PUG
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan terkait kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

P. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja Sub Bidang;
2. Merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan partisipasi perempuan; Menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;
3. Memfasilitasi terhadap organisasi peduli perempuan dan membangun jejaring kerja antar lembaga peduli perempuan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Q. Sub Bidang Perlindungan hak-hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Kerja Sub Bidang;

2. Mermuskan kebijakan teknis dalam Perlindungan Hak-hak Perempuan dan anak;
3. Menyelenggarakan koordinasi antar lembaga/organisasi dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

R. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
 2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
 3. Melaksanakan kegiatan- kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
- 3. Struktur organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana**

Susunan organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri atas :

1. Kepala
2. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 3. Sub Bagian Program

3. Bidang Data dan Pengkajian

1. Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data
2. Sub Bidang Pengkajian Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi

4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

1. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

5. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan
2. Sub Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak

7. Unit Pelaksana Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Deskripsi Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Bantul

Pengarusutamaan Gender(PUG) merupakan pengorganisasian kembali, perbaikan, pembangunan dan evaluasi dari proses kebijakan maka nersektif keadilan gender adalah menyuatu dalam semua kebijakan

pada setiap tingkat dan tahapan oleh pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Bagian yang krusial dalam strategi pengarusutamaan gender adalah pada proses perencanaan dan penganggaran. Anggaran adalah alat yang penting dalam sebuah Negara untuk affirmative action, dalam rangka perbaikan hubungan dalam gender melalui penghapusan kesenjangan gender dalam proses pembangunan. Selain itu dapat menghapus ketidaksetaraan ekonomi, antara laki-laki dan perempuan sama juga antara si kaya dan si miskin.

Anggaran responsif gender adalah pelaksanaan dari pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran. Ini berarti sebagai penilaian anggaran berbasis gender (*gender based assessment of budgets*), digabungkan perspektif gender pada setiap tingkat dalam proses penganggaran dan merestrukturisasi pendapatan dan belanja dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender.

Anggaran responsive gender bukanlah tujuan tetapi hanyalah sebagai alat analisis yang digunakan untuk mendorong terwujudnya anggaran yang berpihak kepada masyarakat baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Wacana anggaran responsive gender sampai saat ini belum banyak dipahami sebagai salah satu strategi mengatasi kemiskinan. Demikian pula masih banyak pihak yang menganggap gender itu menunjukkan perempuan dan gender *mainstreaming* sebagai sebuah program. Sebagai ganti, gender budget disebut juga sebagai anggaran responsive gender,

anggaran sensitive gender dan anggaran untuk perempuan sebagai sinonim. Gender budget tidak berarti terpisah dengan anggaran untuk perempuan yang tidak terbatas pada target pengalokasian anggaran yang setara atau mempromosikan perempuan, namun meliputi keseluruhan anggaran dan pendapatan.

Alokasi anggaran menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah, kemudian dari alokasi anggaran juga dapat diketahui seberapa besar perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Asumsi bahwa anggaran diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, pasti di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan.

Hal ini seringkali menjadi alasan pembenaran pemerintah untuk tidak memberikan perhatian khusus untuk kelompok-kelompok miskin dan minoritas. Padahal meskipun alokasi anggaran itu diberikan kepada semua orang, namun belum tentu dinikmati dengan kapasitas yang setara dan berdampak yang sama bagi semua orang. Faktanya, dampak yang dirasakan perempuan dan laki-laki dari kebijakan anggaran berbeda, umumnya pihak perempuan dirugikan dengan kebijakan anggaran yang netral. Oleh sebab itu, alasan utama diperlukannya anggaran responsif gender dimaksudkan untuk memujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten

Bantul pada belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada setiap SKPD

yang terkait meskipun anggaran responsif gender telah ada, selain itu untuk payung hukum yang terakit dengan anggaran responsif gender itu sendiri sampai sekarang untuk tingkat kabupaten itu sendiri, sedangkan untuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan surat edaran Gubernur No.463/0494 tertanggal 17 januari 2010. Kebijakan tersebut menegaskan dan menguatkan komitmen pemerintah provinsi DIY untuk mengimplementasikan anggaran responsif gender.

Sedangkan dikantor Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada umumnya belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia terhadap pemahaman yang terkait tentang materi yang berkaitan dengan pelaksanaan ARG itu sendiri, sehingga khusus untuk pejabat dilingkungan BKKPPKB diharapkan perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan para birokrat dalam menganalisa program atau kegiatan yang responsif gender.

5. Profil Gender di Kabupaten Bantul Tahun 2010- 2011

Pengertian profil gender adalah sekumpulan data terpilah yang diperoleh dari beberapa dinas maupun badan yang terkait, seperti Badan pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan lain sebagainya. Data terpilah dalam hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah dan dapat diperinci menurut jenis kelamin, wilayah, status ekonomi, waktu yang

dalam analisisnya menggunakan analisis Gender. bentuk data terpilah bisa kualitatif maupun kuantitatif. Dari data terpilah tersebut akan dapat kita ketahui posisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Data terpilah profil Gender banyaknya jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2011

Tabel 2.4

**Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut
Kelompok Umur dan jenis Kelamin 2011**

No	Kelompok Umur	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	38.230	36.045	74.275
2	5-9	35.280	33.105	68.385
3	10-14	35.029	33.720	68.749
4	15-19	36.477	35.251	71.728
5	20-24	37.336	36.026	73.362
6	25-29	38.501	37.433	75.934
7	30-34	37.989	37.319	75.308
8	35-39	35.447	35.676	71.123
9	40-44	34.896	35.895	70.791
10	45-49	31.621	32.634	64.255
11	50-54	28.268	27.903	56.171
12	55-59	20.493	18.939	39.432
13	60-64	12.765	15.043	27.808
14	65-69	11.855	13.779	25.634
15	70-74	10.493	13.233	23.626
16	75+	14.779	19.803	34.582
Jumlah		459.459	461.804	921.263

Sumber: Berdasarkan Data Agregat Hasil SP2010

Data Terpilah profil Gender Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul, 2008, 2009, 2010,dan 2011

No.	Jenis Kegiatan Utama	2008	2009	2010	2011
1	Angkatan kerja/Economic Active	70,30	70,79	70,15	68,83
		94,94			
	1. Bekerja Working				
	2. Pengangguran/ Unemployment	5,06	94,15	94,76	96,20
			5,85	5,24	3,80
2	Bukan Anggaran Kerja/Not economically	29,70	29,21	29,85	31,17
	1. Sekolah/ Attending Scholl	28,44	27,78	29,57	29,30
	2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	59,17	56,93	59,12	54,89
	3. Lainnya/ Others	12,39	12,29	11,32	15,81
	Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00	100,00

	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	70,30	70,79	70,15	68,83
	Tingkat pengangguran	5,06	5,85	5,24	3,80

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas), BPS Kabupaten Bantul

Data terpilah penduduk berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2011.

Tabel 2.6

Persentase penduduk berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2011

No.	Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian	16,91	14,06	15,67
2.	Pertanian Pengolahan	20,52	27,68	23,64
3.	Perdagangan , Hotel, dan Restoran	21,38	36,76	28,08
4.	Jasa- jasa	16,41	19,134	17,60
5.	Lainnya	24,78	2,34	15,01
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Angkatan Krerja Nasional (Sakernas), BPS Kabupaten Bantul

Data Terpilah Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari pegawai otonomi Daerah dan pegawai Vertikal sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Pegawai Otonomi Daerah dan pegawai Negeri Vertikal
Kabupaten Bantul Tahun 2011**

No	Pegawai Otonomi Daerah	Jumlah	Pegawai Negeri Vertikal	Jumlah
1.	Laki-laki	5.864	Laki-laki	823
2.	Perempuan	6.486	Perempuan	663
	Total	12.350	Total	1.486

Data Terpilah Persentase Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2011

Tabel 2.8

Persentasi Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2011

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	15,21	17,99	16,19
SLTP	25,00	13,45	20,92
SLTA ke atas	59,79	68,56	62,89
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Data Terpilah Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKL, AKAD dan
 AKAN di Kabupaten Bantul, 2010-2011

Tabel 2.9

**Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN di
 Kabupaten Bantul, 2010-2011**

Mekanisme Penempatan	2010			2011		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. AKL	98	114	212	38	1.288	1.326
2. AKAD	142	362	504	115	345	460
3. AKAN	95	300	395	181	197	378
Jumlah	335	776	1.111	334	1.830	2.164

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Ket:

1. AKL : Antar Kerja Lokal, yaitu Penempatan Tenaga Kerja se Kab/Prop
2. AKAD: Antar Kerja Daerah, yaitu Penempatan Tenaga Kerja ke Propinsi lain
3. AKAN: Antar Kerja Negara, yaitu Penempatan Tenaga Kerja ke Negara

Data Terpilah Penempatan Pencari Kerja menurut Sektr Usaha di Kabupaten

Bantul, 2010 – 2011

Tabel 2.10

**Penempatan Pencari Kerja menurut Sektor Usaha di Kabupaten Bantul,
2010–2011**

No	Sektor Usaha	2010			2011		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	99	65	164	98	59	157
2.	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	7.866	11.994	19.860	8.048	9.993	17.891
4.	Listrik, Gas dan Air	385	33	418	485	44	529
5.	Bangunan	1.816	335	2.151	1.816	909	2.725
6.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	3.231	1.457	4.688	3.343	1.645	4.988
7.	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	190	74	264	160	41	201
8.	Keuangan, Asuransi, dan Usaha Persewaan Bangunan	551	263	814	623	272	895
9.	Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan	1.540	2.432	3.972	1.653	2.447	4.100

	Jumlah	15.678	16.653	32.331	16.226	15.350	31.576
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

6. Program kerja/kegiatan Di Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB) Kabupaten Bantul.

Dalam hal ini , adapun program/kegiatan yang dilakukan oleh kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan , dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yaitu

1. Program penguatan kelembagaan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan yaitu :

a) Sosialisasi dan Advokasi kebijakan penghapusan buta Aksara perempuan(PBAP)

b) Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak yaitu :

a) Pemberdayaan lembaga yang berbasis Gender

b) Sesehan pemberdayaan perempuan

4. Program Keluarga Berencana yaitu :

a) Pembinaan Keluarga Berencana

b) pendampingan Kegiatan Hargana xvi

5 . Program Kesehatan Reproduksi Remaja yaitu :

a)Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Program penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga

a) Pengembangan ADITUKA(Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)

b) Fasilitas kegiatan pengembangan program posyada

7. Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu+ PADU

a) Fasilitas kegiatan keterpaduan BKB-Posyandu Padu

8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunikasi Adat

7. Program Sosialisasi Anggaran Responsif Gender di BKKPPKB Kabupaten Bantul

Adapun program sosialisasi terhadap anggaran responsif gender di BKKPP dan KB Kabupaten Bantul antara lain yaitu :

1. Advokasi dan Fasilitasi Pengarusutamaa Gender Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Di SKPD
2. Workshop sinkronisasi Penyusunan RKA SKPD Responsif Gender untuk Perencana Program
3. Pendampingan Penyusunan Program/Kegiatan SKPD Responsif Gender untuk Perencana Program pada bidang/Sub Bagian
4. Rakor Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah bagi TAPD
5. Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bantul (dalam proses penandatanganan)